

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Masyhud, 1999, *Cermin Retak Perbankan Refeksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Gramedia, Jakarta.

CITA (*Center for Indonesia Taxation Analysis*), 2016, *Exchange of Information* Peluang dan Tantangan.

Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Husein, Yunus, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2012. *Manajemen Perbankan*. BPF, Yogyakarta.

Lash, Nicholas, A, 1987, *Banking Law dan Regulation*, AN Economics Perspective, Prentice-Hall Inc., USA.

OECD, 2014, *Automatic Exchange of Information, A Roadmap for Developing Country Participation*, OECD Publisher, Paris.

OECD, 2016, *Automatic Exchange of Information, What it is, how it works, benefits, what remains to be done*, OECD Publisher, Paris.

Remy Sjahdeini, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Remy Sjahdeini, Sutan 2005, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, FGD Pengaturan Rahasia Bank, Bank Indonesia.

- Shofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Nasional*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supriyono, 2011, *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Buku 1 Edisi 2. BPFE Yogyakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Suyatno, Thomas dkk, 1987, *Kelembagaan Perbankan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1993, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Artikel Jurnal

- Glover, Jhon, “Bank and Fiduciary Relationship”, *Bond Law Review*, Vol. 7, No. 5, 1995.
- Sakti, Wira Nufransa, “Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal”, *Media Keuangan*, Juni 2017.
- Kar, Dev dan Joseph Spanjers, “Illicit Financial Flows from Developing Countries 2003–2012”, *Global Financial Integrity*, 2014.
- Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Automatic Exchange of Information*, 2016.
- Tax Justice Network, “The Price of Offshore Revisited”, *Press Release*, 2010.

c. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- I gusti Rai Daneiel Ari Putra, 2010, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbnakan Sebagaimana Telah*

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1- Tahun 1998 Mengenai Eksistensi Lembaga Rahasia Bank di Dalam Melindungi Nasabah Pada Bank, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Siti Chasanah, 2015, *Pengaruh Kualitas Layanan, Komitmen, Kepercayaan, dan Kepuasan Pada Loyalitas Nasabah Perbankan*, Tesis, Program Magister Sains Ilmu Management UGM, Yogyakarta.

d. Internet

Barus Herry, “Menkeu Minta Masyarakat Tidak Pecah Saldo”, <http://www.industry.co.id/read/10240/menkeu-minta-masyarakat-tidak-pecah-saldo-rekening>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 11.25 WIB.

BEM FEB UGM, “Dampak Penerapan Automatic Exchange of Information Terhadap Reformasi Perpajakan Paska Amnesti Pajak” <http://www.fmeindonesia.org/dampak-penerapan-automatic-exchange-of-information-terhadap-reformasi-perpajakan-paska-amnesti-pajak/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 00.45 WIB.

Sri. Hartati Enny, “Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Perppu Akses Informasi Pajak”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593a6b711c3b7/pemerintah-diminta-pertimbangkan-dampak-perppu-akses-informasi-pajak>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 13.28 WIB

INDEF “Dampak Buruk Perpu Bagi Nasabah dan Masyarakat” <https://www.ucnews.id/news/Dampak-Buruk-Perppu-No-1-Tahun-2017-Bagi-Nasabah-Bank-dan-Masyarakat/2412762773196275.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 13.54 WIB.

Karo-Karo Rizky, “Empat Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan di Indonesia”, <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/prinsip-kegiatan-usaha-perbankan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

Obie Afri Gultom, “Pengertian Bank dan Jenis-Jenis Usaha Bank”, <http://www.gultomlawconsultants.com/pengertian-bank-dan-jenis-jenis-usaha-bank/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 20.40 WIB.

Primadhyta Safyra, “Peluang Keterbukaan Informasi Perpajakan Bagi Bos OCBC” *NISP*
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170619071535-84-222665/peluang-keterbukaan-informasi-perpajakan-bagi-bos-ocbc-nisp>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 23.30 WIB.

Ratyh “Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan”
<https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/prinsip-kegiatan-usaha-perbankan>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 13.30 WIB.

e. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 837).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK/3/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*).

Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian tentang *Automatic Exchange of Information* tahun 2016.

f. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Slamet Selaku Responden Nasabah BRI yang Berprofesi Sebagai Pengusaha Percetakan di Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Rahmat Setyawan Selaku Responden Nasabah BNI yang Berprofesi Sebagai Pengusaha Tanah di Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Ahkob Krismanto Selaku Responden Nasabah BNI yang Berprofesi Sebagai Dokter Umum di Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Tika selaku Ketua Sub Bidang Edukasi dan Pelayanan Masyarakat pada Kantor OJK Regional 3 Jateng DIY.

Wawancara dengan Devi selaku staf bagian Pengawasan Bank pada Kantor OJK Regional 3 Jateng DIY.

Wawancara dengan Yere selaku bagian umum pada BNI Cabang UGM, Sleman.

Wawancara dengan Mia selaku bagian legal pada BNI Kantor KM 0 Yogyakarta.